

ETIKA MIGRASI GLOBAL: TINJAUAN KRITIS MARTABAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Petrus Efriem Foni¹

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maheboro, Kec. Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Kode Pos 86152

*Penulis Korespondensi: Cidifoni@gmail.com

Abstract. *The current phenomenon of global migration has become a complex social reality with a significant increase in the number of international migrants, reaching 281 million people in 2022. Beyond these figures, migrants often face various humanitarian issues, ranging from human rights violations and discriminatory treatment to state-sponsored anti-migrant policies. This paper aims to examine the ethics of global migration through a critical review of human dignity from the perspectives of Catholic Social Teaching (CST) and International Law. The method used is descriptive-qualitative with an interdisciplinary approach that combines theological-biblical analysis, a juridical review of international law, and economic sociology. The theological foundation of migration rests on the unity of the human family, as all are created in the image and likeness of God. Consequently, every individual possesses a unique dignity that transcends racial and cultural boundaries. This universal brotherhood mandates that everyone accept and love others without exception, including migrants. Discussion results indicate the importance of integrating legal and moral orders in handling migration. Morally, migrants must be accepted because acceptance is a rightful value, while legally, the aspect of legality remains necessary to ensure protection and legal certainty. The diplomacy of the Holy See and the roles of international organizations such as the IOM are emphasized as means to defend human dignity and encourage international cooperation. Furthermore, migration is viewed as an instrument of economic development that can aid in poverty alleviation and the fulfillment of foreign debt obligations through remittances. As a practical solution, bureaucratic reform is required through a one-roof service system and the involvement of local informal institutions to ensure the migration process operates fairly, safely, and with dignity for all parties.*

Keywords: *Global Migration, Catholic Social Teaching, Human Dignity, International Law, International Cooperation.*

Abstrak. Fenomena migrasi global saat ini telah menjadi realitas sosial yang kompleks dengan peningkatan jumlah migran internasional yang signifikan, mencapai 281 juta orang pada tahun 2022. Di balik angka tersebut, para migran sering kali menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perlakuan diskriminatif, hingga kebijakan negara yang anti-imigran. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji etika migrasi global melalui tinjauan kritis terhadap martabat manusia dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja (ASG) dan Hukum Internasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis teologis-biblis, tinjauan yuridis hukum internasional, dan sosiologi ekonomi. Dasar teologis migrasi berpijak pada kesatuan keluarga umat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap individu memiliki martabat unik yang melampaui batas-batas ras dan budaya. Persaudaraan universal ini mewajibkan setiap orang untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa terkecuali, termasuk para migran. Hasil pembahasan menunjukkan pentingnya integrasi antara tatanan hukum dan tatanan moral dalam menangani migrasi. Secara moral, migran harus diterima sebagai sesama manusia yang berharga, sementara secara hukum, aspek legalitas tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Diplomasi Takhta Suci dan peran organisasi internasional seperti IOM ditekankan sebagai sarana untuk membela martabat manusia dan mendorong kerja sama antarbangsa. Selain itu, migrasi dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat membantu pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kewajiban utang luar negeri melalui remitansi. Sebagai solusi praktis, diperlukan pembenahan birokrasi melalui sistem pelayanan satu atap dan pelibatan lembaga informal lokal untuk memastikan proses migrasi berjalan secara adil, aman, dan bermartabat bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Migrasi Global, Ajaran Sosial Gereja, Martabat Manusia, Hukum Internasional, Kerja Sama Internasional.*

1. LATAR BELAKANG

Saat ini, salah satu fenomena sosial yang terjadi di dunia ialah migrasi. Migrasi terjadi pada skala lokal, nasional, maupun internasional dengan berbagai macam kepentingan, baik karena kerja, studi, pernikahan, dan lain-lain. Pada tahun 2005, *Global Commission on International Migration* mencatat bahwa antara tahun 1970 dan 2005 jumlah migran internasional meningkat dari 82 juta hingga 200 juta. Di samping itu, *The Interactive World Migration Report of the International Organization for Migration* (IOM) menyatakan bahwa ada sekitar 281 juta migran internasional pada tahun 2022 (Patrick Lukusa Kadima, 2024:490).

Berdasarkan penjelasan Bimal Ghosh yang dikutip oleh Izza Mafruhah dan rekan-rekan, migrasi dapat diartikan sebagai perubahan lokasi tinggal yang bersifat permanen atau semi-permanen (dalam rentang waktu tertentu). Fenomena migrasi ini berdampak pada aspek sosial serta teritorial, mencakup pergeseran lokasi, jumlah penduduk, dan densitas populasi di suatu area, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan kependudukan serta program pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut (Izza Mafruhah, dkk., 2017:51).

Migrasi penduduk mencerminkan perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi serta ketidakmerataan dalam penyediaan fasilitas pembangunan di berbagai wilayah. Masyarakat dari daerah dengan pertumbuhan yang lambat cenderung berpindah ke daerah yang memiliki laju pertumbuhan lebih cepat (Izza Mafruhah, dkk., 2017:51).

Malangnya, ada banyak permasalahan yang terjadi dalam proses dan pelaksanaan migrasi. Sebagai contoh, masalah migrasi internasional muncul di Indonesia ketika banyak tenaga kerja dari negara ini bekerja di luar negeri, seperti di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Mereka sering mengalami perlakuan tidak adil yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pada masa kepresidenan Donald Trump, keberadaan imigran di Amerika Serikat dipandang sebagai sebuah masalah bagi negara dan penduduk AS. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Trump selama itu menunjukkan adanya sikap nasionalisme, penolakan terhadap imigran, dan kebijakan yang tidak ramah terhadap Muslim. Imigran yang masuk ke AS, menurut pandangan Trump dan para pendukungnya, dianggap sebagai ancaman atau kelompok yang dapat merebut pekerjaan yang ada, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kalangan penduduk asli AS (Taufik dan Sundari Ayu Pratiwi, 2021:222). Kemudian, di bagian lain Eropa, seperti Yunani, Italia, Hongaria, dan Polandia, permusuhan terhadap para migran telah berkembang sampai batas tertentu, bahkan disponsori negara (Patrick Lukusa Kadima, 2024:489).

Hemat penulis, masalah-masalah yang dialami oleh para migran merupakan hal-hal yang sangat memprihatinkan dan perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan. Sebab, para migran juga merupakan pribadi-pribadi yang bermartabat dan perlu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi aneka permasalahan dalam proses dan pelaksanaan migrasi, kajian dari perspektif Ajaran Sosial Gereja (ASG) tentang Masyarakat Internasional perlu dibuat dan disajikan ke ruang publik, sehingga semua elemen masyarakat dunia dapat menangani migrasi dan persoalan-persoalannya dengan perspektif yang berbeda dan teraktual. Maka, dalam tulisan ini, kami akan mengkaji migrasi dari perspektif ASG dengan judul **“Etika Migrasi Global: Tinjauan Kritis**

Martabat Manusia dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja dan Hukum Internasional”.

2. KAJIAN TEORITIS

Dasar Teologis Migrasi

Kesatuan Keluarga Umat Manusia

Keluarga umat manusia terhubung karena kita diciptakan oleh Tuhan berdasarkan citra dan bentuk-Nya. Dengan keputusan Allah untuk menciptakan manusia menurut citra dan rupa-Nya (lihat Kej 1:26-27), manusia diberikan martabat yang istimewa dan hal ini meluas kepada setiap generasi (lihat Kej 5) serta ke seluruh penjuru dunia (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:221). Oleh karena itu, semua manusia di dunia memiliki dasar untuk bersatu, yaitu karena memiliki martabat yang sama, sehingga semua manusia berhak diperlakukan secara sama sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Kesatuan manusia itu membuat manusia bisa bermigrasi ke berbagai tempat. Apalagi banyak orang bermigrasi karena ingin mengokohkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang luhur dan mulia. Ada banyak alasan yang membuat orang bergerak dari tempat tinggal mereka. Pertama, terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal sering kali mendorong migrasi. Selain itu, tekanan yang datang dari faktor politik, ideologi, agama, dan suku dapat berujung pada konflik bersenjata, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat setempat. Lainnya termasuk pencarian pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan. Faktor alam, seperti banjir, kebakaran, gempa, tsunami, musim kering yang berkepanjangan, serta wabah penyakit juga menjadi penyebab. Selain itu, semakin menipisnya sumber daya, termasuk penurunan daya dukung lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam, serta berkurangnya permintaan untuk barang-barang tertentu yang bahan bakunya sulit didapat seperti hasil tambang, kayu, atau produk pertanian turut berkontribusi pada fenomena ini (Izza Mafruhah, dkk., 2027: 61). Hal-hal itu merupakan ancaman terhadap keselamatan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, migrasi dapat menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan harkat dan martabat manusia, sehingga migrasi tidak bisa dilarang dan harus didukung sejauh mendukung keselamatan umat manusia di dunia. Lebih dari itu, Allah berkehendak untuk memastikan bahwa setiap manusia mendapatkan semua yang diperlukan secara mutlak untuk perkembangan diri, kebebasan dalam mengekspresikan diri, keberhasilan dalam pekerjaan, dan hubungan antar manusia yang harmonis (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:292).

Yesus Kristus: Prototipe dan Fondasi Kemanusiaan yang Baru

Tentu, untuk mendukung terjadinya migrasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik dari segi proses, pelaksanaan, maupun perlakuan terhadap para migran, semua orang membutuhkan prototipe dan fondasi yang baik dan benar. Tanpa mengabaikan prototipe dan fondasi dari agama-agama lain, prototipe dan fondasi dari agama Kristen Katolik dan Protestan ialah Yesus Kristus. Sebab, melalui Yesus Kristus, manusia – yang diciptakan menurut citra Allah – mendapati keberadaannya yang sempurna. Dalam kesaksian yang jelas mengenai kasih yang dinyatakan oleh Allah di salib Kristus, semua penghalang permusuhan telah berhasil dihilangkan (bdk. Ef 2:12-

28), dan bagi mereka yang menjalani hidup baru dalam Kristus, perbedaan suku dan budaya tidak lagi menjadi sebab perpecahan (bdk. Rm 10:12; Gal 3:26-28; Kol 3:11).

Artinya, Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan cara untuk menerima dan memperlakukan semua orang dengan penuh cinta kasih, bahkan sampai mengorbankan nyawa Nya di atas kayu salib. Dia menerima dan memperlakukan semua orang tanpa “pandang bulu” dan tanpa melihat latar belakang dari orang-orang yang datang kepada-Nya. Dia menerima dan memperlakukan perempuan Samaria dan orang-orang di luar bangsa Yahudi dengan baik dan benar (Yoh 4:1-42), sehingga Dia itu begitu berbeda dengan orang-orang Yahudi yang sangat kaku dan taat buta terhadap aturan dan kebiasaan orang Yahudi pada zaman-Nya. Menurut Arif Yupiter Gulo, Yesus menunjukkan contoh saat Ia melayani tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi, termasuk orang Samaria. Namun, orang Yahudi biasanya tidak berhubungan dengan orang Samaria karena mereka sering menghindari kota tersebut. Hal ini terjadi karena Samaria merupakan tempat di mana terjadi campuran antara orang Yahudi dan bangsa lain, sehingga dianggap sebagai daerah kafir. Selain itu, orang Yudea juga melihat kelompok Samaria sebagai yang paling terpuruk. Mereka dinilai telah kehilangan identitas sebagai bangsa Israel. Orang Yahudi meyakini bahwa orang Samaria adalah sama buruknya dengan orang-orang kafir (Arif Yupiter Gulo, 2020:178).

Panggilan Universal Agama Kristen

Amanat Kristiani memegang peran krusial dalam menyadarkan masyarakat dunia bahwa persatuan antarbangsa tidak sekadar dibangun di atas fondasi organisasi formal, kepentingan politik, maupun skema ekonomi semata. Lebih dari itu, persatuan sejati lahir dari kehendak bebas untuk bekerja sama atas dasar kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian tak terpisahkan dari satu keluarga besar umat manusia. Kesadaran akan persaudaraan universal ini merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus.

Oleh sebab itu, setiap umat Kristiani memiliki panggilan iman untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali, termasuk para migran. Penting untuk dipahami bahwa siapa pun bisa berada dalam posisi sebagai migran karena berbagai alasan yang mendasar, seperti: Keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan taraf hidup yang lebih layak, Upaya mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas, Pencarian lingkungan hidup yang lebih kondusif, nyaman, serta didukung fasilitas publik yang memadai, Daya tarik pusat kebudayaan dan aktivitas perkotaan yang menawarkan peluang pengembangan diri

Seluruh motivasi tersebut adalah hal yang positif dan mulia, sehingga menerima serta mengasihi kaum migran bukanlah sebuah kesalahan. Meski demikian, wilayah yang menerima kedatangan mereka perlu menerapkan kontrol dan edukasi agar para migran dapat berintegrasi secara harmonis. Tujuannya adalah memastikan mereka hidup dan beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai universal, yakni dengan senantiasa berbuat baik dan menjauhi tindakan destruktif yang merugikan masyarakat sekitar.

Aturan Hakiki Masyarakat Internasional: Tinjauan Yuridis

Masyarakat Internasional dan Nilai-nilai

Masyarakat internasional terdiri dari sistem hukum yang dibentuk berdasarkan kedaulatan masing-masing negara anggota, tanpa ada paksaan subordinasi yang dapat menghapus atau membatasi kebebasan mereka. Ini juga merupakan kumpulan kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari berbagai komunitas yang saling terkait dengan kuat. Struktur masyarakat internasional saat ini dibangun di atas prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan kesetaraan antara satu negara dan negara lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat internasional mengakui dan mematuhi hukum internasional karena adanya kesadaran tentang perlunya norma hukum yang menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dan dikutip oleh Levina Yustitiningtyas, ketika negara atau aktor lain dalam hubungan internasional berinteraksi satu sama lain, mereka dengan sadar membutuhkan norma atau pedoman perilaku, yaitu hukum internasional, yang berfungsi untuk mengatur hubungan di antara mereka (Levina Yustitiningtyas, 2025:96).

Pemahaman yang dimiliki oleh komunitas global tidak akan menghilangkan perbedaan dan karakteristik unik setiap individu. Dengan tetap menghargai identitas yang beragam, kita dapat lebih mudah menangani berbagai bentuk konflik yang sering kali memisahkan negara-negara dan juga kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan di tingkat internasional. Sehubungan dengan isu migrasi, setiap individu di seluruh dunia, termasuk para migran, wajib mematuhi hukum internasional terkait migrasi, yang tercantum dalam Pasal 13 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari tahun 1948: "Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negara tersebut." Berdasarkan hal ini, hukum internasional diharapkan dapat memberikan ketenangan, keadilan, dan kepastian hukum bagi keberadaan para migran selama mereka berada di lokasi tujuan migrasi (Patrick Lukusa Kadima, 2024:490).

3. METODE PENELITIAN

Metode Deskriptif-Kualitatif: Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literatur) dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi Gereja (Ensiklik, Kompendium ASG) dan data sekunder dari organisasi internasional seperti IOM. Pendekatan Interdisipliner: Menggabungkan analisis teologis-biblis dengan tinjauan yuridis hukum internasional dan sosiologi ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Hukum dan Moral

Tatanan hukum adalah kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu aturan hukum atau yurisdiksi. Tatanan hukum memaksa kewajibannya pada individu. Sementara itu, tatanan moral adalah nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat tentang hal yang benar dan hal yang salah. Misalnya, ada masyarakat tertentu yang menganggap pemberian dengan tangan kiri itu salah dan pemberian dengan tangan kanan itu benar (Ellon Belwan C. Mau, 2024:82)

Dalam kaitannya dengan migrasi, segala sesuatu tentang migrasi perlu diatur dengan tatanan moral dan tatanan hukum, supaya proses, pelaksanaan, maupun perlakuan untuk para migran saat sudah ada, tinggal, dan beraktivitas di wilayah tertentu dapat berjalan dengan baik dan benar. Misalnya, aspek penerimaan dan penolakan terhadap para migran perlu ditinjau dari perspektif tatanan moral dan tatanan hukum.

Dari segi tatanan moral, para migran tentunya harus diterima karena aspek penerimaan kepada semua orang merupakan nilai yang benar, sedangkan aspek penolakan merupakan nilai yang salah. Sebab, menurut Paus Yohanes Paulus II dalam pesannya pada hari peringatan ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (5 Oktober 1995), hukum moral yang bersifat universal dan tercatat di dalam hati manusia, harus dianggap memiliki kekuatan dan tidak bisa dihapus sebagai ungkapan yang nyata dari hati nurani manusia (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:297).

Sementara itu, dari segi tatanan hukum, para migran bisa diterima atau bisa ditolak sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Dalam tatanan hukum, penekanan pada aspek legal dan ilegal dari migrasi sangat penting untuk diperhatikan. Tentunya, migrasi diharapkan menggunakan aspek legal, supaya proses, pelaksanaan, maupun perlakuan untuk para migran saat sudah ada, tinggal, dan beraktivitas di wilayah tertentu dapat berjalan dengan baik dan benar. Sebagai contoh, Bambang Picakcono Triantoro menyatakan bahwa program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus lebih mendalami langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan kerja di lokasi kerja. Pihak pemerintah, Departemen Tenaga Kerja, atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia perlu mengambil tindakan serius. Hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan sistem pengiriman pekerja yang berfokus utamanya pada perlindungan hak-hak pekerja, bukan pada kepentingan bisnis (Bambang Picakcono Triantoro, 1999:14).

Karena itu, pengakuan yang menyeluruh terhadap nilai-nilai yang mendasari "struktur hukum yang sejalan dengan norma moral" adalah hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam hubungan internasional. Upaya untuk mencapai stabilitas ini telah berkembang menjadi penjelasan secara bertahap tentang "hak-hak bangsa-bangsa", yang dapat dipahami sebagai "asal usul hukum internasional". Pemikiran hukum dan teologis, yang didasari oleh hukum alam, telah mengembangkan "prinsip-prinsip universal yang ada sebelum dan lebih tinggi dari hukum nasional", seperti persatuan umat manusia, martabat yang setara bagi setiap individu, penolakan terhadap peperangan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, kewajiban untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama, serta pentingnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Peran Organisasi Internasional: Kritik terhadap efektivitas IOM dan PBB

Ada banyak organisasi internasional di dunia ini. Secara umum, ASG memiliki pandangan positif terhadap peranan organisasi-organisasi yang beroperasi antar pemerintah, terutama yang fokus pada sektor-sektor tertentu. Namun, ASG juga menyampaikan beberapa keberatan bila organisasi-organisasi ini tidak menangani masalah dengan cara yang benar. Magisterium mendorong agar institusi-institusi internasional merespons kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial serta dalam bidang-bidang yang sangat vital untuk kehidupan harmonis dan tertib antar negara dan bangsa. Dalam hal ini, Paus Yohanes Paulus II, sebagaimana dinyatakan dalam ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, menginginkan agar lembaga-lembaga internasional harus memastikan tercapainya kesetaraan yang menjadi dasar hak setiap orang untuk terlibat dalam proses pembangunan secara menyeluruh, sambil menghargai dengan sungguh-sungguh berbagai perbedaan yang sah (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:300-302).

Salah satu bagian dari kehidupan sosial yang diperhatikan dan dianggap penting oleh Magisterium untuk ditanggapi dan dijamin oleh organisasi internasional ialah migrasi. Hal tersebut secara jelas terungkap melalui komitmen besar Paus Fransiskus terhadap jamaah migran. *Pertama*, Paus Fransiskus menempatkan misi Ilahi di pusat kehidupan global untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Dengan demikian, migran, tanpa memandang kedudukan mereka, merupakan bagian dari umat Allah yang harus diterima. *Kedua*, Paus Fransiskus mengingatkan pentingnya pendampingan yang jelas bagi para migran, baik dari pihak Gereja maupun pemerintah. *Ketiga*, migran merupakan individu yang mengalami kemiskinan, kelemahan, dan ketidakberdayaan yang memerlukan jaminan untuk kehidupan yang lebih baik (Susanna Snyder, Joshua Ralston, and Agnes M. Brazal, 2016:35).

Bahkan dalam anjuran apostoliknya, yaitu *Evangelii Gaudium*, Paus Fransiskus mengajak semua lapisan masyarakat untuk menaruh kepedulian terhadap para migran. Paus Fransiskus menulis:

Para migran memberikan tantangan khusus bagi saya, karena saya adalah imam dari seluruh Gereja tanpa perbatasan, Gereja yang menganggap dirinya ibu bagi semua. Oleh sebab itu, saya menyerukan kepada setiap negara untuk memiliki keterbukaan murah hati yang akan mampu menciptakan bentuk-bentuk sintesis budaya baru tanpa perlu takut kehilangan identitas lokal. Betapa indahnya kota-kota yang mampu mengatasi kecurigaan yang melumpuhkan, mengintegrasikan orang-orang yang berbeda, dan menjadikan integrasi ini suatu faktor baru dari pengembangan (Paus Fransiskus, 2014:299).

Seruan dan ajakan Paus Fransiskus itu sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh masyarakat internasional. Memang pada umumnya, Paus Yohanes Paulus II, sebagaimana tertulis dalam amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia Tahun 2004, melihat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “telah melakukan sebuah andil yang mencolok untuk menggalakkan penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan bangsa-bangsa serta tuntutan-tuntutan pembangunan, dan dengan demikian mempersiapkan pijakan budaya serta kelembagaan bagi pembangunan perdamaian”, termasuk dalam menangani migrasi. Sebab, PBB sudah memiliki lembaga internasional untuk menangani migrasi, yaitu *International Organization for Migration (IOM)* (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2021:5).

Namun, persoalan-persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan migrasi tetap terjadi selama ini. Misalnya, di bagian lain Eropa, seperti Yunani, Italia, Hongaria, dan Polandia, permusuhan terhadap para migran telah berkembang sampai batas tertentu, bahkan disponsori negara. Pada titik ini, kami menilai bahwa peran IOM belum terlalu optimal untuk menangani persoalan-persoalan migrasi internasional.

Diplomasi Takhta Suci

Gereja adalah mitra dalam perjalanan menuju sebuah “komunitas” internasional yang sejati.⁴³ Kehadiran Gereja sebagai mitra tentu lahir dari Amanat Agung yang diwariskan oleh Yesus sendiri. “Kepada-Ku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” (bdk. Mat 28:18-20). Panggilan ini menunjukkan bahwa Gereja adalah kumpulan individu percaya yang memberikan pengaruh kepada masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu, Gereja perlu berperan secara aktif dalam menciptakan kemitraan yang nyata di dalam pelayanan misi sebagai wujud dari Gereja yang dinamis dan setia dalam melaksanakan Amanat Agung dari Tuhan Yesus Kristus (Hutapea, 2013:188).

Sebagai konsekuensinya, Takhta Suci atau Takhta Apostolik mendapatkan status internasional yang lengkap sebagai sebuah kekuasaan yang merdeka, yang melakukan beberapa tindakan, yang secara hukum merupakan tindakan-tindakannya sendiri. Ia menjalankan suatu kekuasaan luar yang diakui dalam konteks masyarakat global, tetapi mencerminkan pelaksanaan kekuasaan tersebut secara internal dalam Gereja dan ditandai oleh kesatuan organisasi serta kemandirian.

Kegiatan internasional Takhta Suci ditunjukkan dengan jelas melalui berbagai aspek: hak untuk mengirim dan menerima delegasi; penerapan *Ius contrahendi* (hak untuk membuat perjanjian internasional) dalam menetapkan kesepakatan; partisipasi dalam organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti yang berada di bawah naungan PBB; serta usaha mediasi dalam situasi konflik yang berbeda. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan yang adil kepada masyarakat global. Karena, Gereja tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk kesejahteraan semua orang. Dalam hal ini, pelayanan diplomatik Takhta Suci adalah alat yang tidak hanya mendukung kebebasan Gereja (*libertas Ecclesiae*), tetapi juga melindungi dan meningkatkan martabat manusia, serta menciptakan tatanan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kasih (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:302).

Salah satu bentuk pelayanan diplomatik Gereja yang diwakili oleh Takhta Suci ialah pelayanan di bidang migrasi. Pada tahun 1970, Paus Paulus VI membentuk Komisi Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Migran dan Pariwisata dengan mengubah Konstitusi Apostolik Pastor Bonus menjadi Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Migran dan Orang yang Sedang Berada di Perantauan. Dengan reksa pastoral, dewan itu dipercaya untuk menangani mereka semua “yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka, juga mereka yang tidak memiliki tanah air” (Yohanes Paulus II, 1988:899).

Perwakilan Takhta Suci sekali lagi menyerukan tanggung jawab global terhadap para pengungsi. Wakil dari Takhta Suci menegaskan bahwa: “Tugas kita ialah mewujudkan solidaritas. Ini mencakup penerimaan dan pengakuan terhadap fakta bahwa kita sebagai sebuah keluarga manusia saling bergantung. Ini meminta dari kita sebuah kerja sama internasional bagi orang-orang miskin dan tak berdaya yang adalah saudara dan saudari kita. Tanggung jawab efektif dan pembagian beban di antara semua negara sangat diperlukan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas. Ini hendaknya menjadi sebuah inspirasi bagi keluarga bangsa-bangsa manusia untuk merefleksikan tantangan tantangan zaman sekarang dan menemukan solusi yang diperlukan dalam semangat dialog dan pemahaman timbal balik. Generasi kita dan generasi mendatang menuntut hal ini supaya para pengungsi dan pengungsi dalam negeri dapat memetik manfaat dari padanya” (Perwakilan Takhta Suci, 2001:13).

Semua itu menunjukkan bahwa Takhta Suci benar-benar peduli dan perhatian terhadap migrasi. Bagi Takhta Suci, persoalan migrasi merupakan persoalan dan tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, semua orang perlu bersatu hati dan bergandengan tangan untuk menerima situasi migrasi sekaligus menangani masalah-masalah di dalam proses dan pelaksanaan migrasi di berbagai tempat atau wilayah di dunia ini.

Migrasi dan Pembangunan Ekonomi

Kerja Sama untuk Menjamin Hak atas Pembangunan

Solusi untuk isu pembangunan membutuhkan kolaborasi dari setiap kelompok politik. Dalam surat ensiklik *Centesimus Annus*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa kolaborasi adalah cara di mana semua komunitas internasional harus berkontribusi “dengan pemahaman yang cukup mengenai kesejahteraan bersama terkait dengan seluruh keluarga umat manusia” (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:306).

Menyangkut hal tersebut, dalam surat ensiklik *Mater et Magistra*, Paus Yohanes XXIII menyatakan bahwa negara-negara saling mempengaruhi satu sama lain. Kita dapat mengatakan bahwa setiap negara akan mencapai kemajuan dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan negara-negara lain melalui kolaborasi. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam surat ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, kerja sama untuk pembangunan manusia secara menyeluruh dan setiap individu merupakan tanggung jawab bersama, yang harus dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia: dari Timur ke Barat dan dari Utara ke Selatan. Selain itu, menurut Paus Paulus VI dalam surat ensiklik *Populorum Progressio*, semangat kerjasama global membutuhkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap solidaritas, keadilan, dan kasih sayang universal, melampaui pendekatan pasar yang kaku (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:306).

Kerja sama internasional itu dapat dibuat dalam berbagai bidang, termasuk bidang migrasi. Sebab, menurut Armada Riyanto, kerja sama antara negara asal dan tempat tujuan kaum migran perlu ada agar para migran mendapatkan jaminan keamanan, sehingga kaum migran tidak dianggap sebagai komoditas atau tenaga kerja belaka. Misalnya, kerja sama untuk memperlakukan para migran yang sedang bekerja secara adil karena itulah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur manusia (Armada Riyanto, 2014:125).

Selain itu, kerja sama antara negara asal dan tempat tujuan menjadi penting karena migrasi secara global dapat berkontribusi pada kesejahteraan migran dan komunitasnya. Migrasi juga berpotensi memberikan sumbangan pada pembangunan berkelanjutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Misalnya, para migran dari Indonesia yang bekerja di Malaysia telah banyak mengirimkan uang dari hasil kerja mereka ke kampung halaman di Indonesia untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menyekolahkan anak, dan lain-lain. Di sisi lain, kehadiran dan kerja mereka di Malaysia telah membantu negara Malaysia dalam memajukan perekonomian Malaysia. Oleh karena itu, kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia menjadi sangat penting untuk melindungi dan menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para migran.

Perjuangan Mengentaskan Kemiskinan

Dalam surat ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa kemiskinan adalah isu keadilan yang sangat serius. Dengan berbagai bentuk dan dampak yang berbeda-beda, kemiskinan terlihat sebagai suatu pertumbuhan yang tidak seimbang, yang mengabaikan hak setara bagi tiap bangsa "untuk bersama-sama duduk di meja makan" (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2021). Menurut BPS, jumlah penduduk miskin, berdasarkan pendataan terbaru pada September 2025. Besaran penduduk miskin menjadi sebanyak 23,36 juta orang, atau turun sekitar 490 ribu orang dibanding catatan per Maret 2025.

Dalam pidato yang disampaikan pada Musyawarah Paripurna Ketiga Uskup di Amerika Latin, Puebla, Meksiko, di tahun 1979, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa usaha untuk mengatasi kemiskinan memiliki motivasi yang kuat berdasarkan pilihan atau kasih Gereja yang lebih mengutamakan orang-orang miskin. Lalu, dalam Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia Tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa orang-orang miskin mesti dilihat "bukan sebagai suatu masalah, melainkan sebagai orang yang dapat menjadi pembangun utama suatu masa depan baru dan lebih manusiawi bagi setiap orang" (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:307). Pada titik ini, Paus Yohanes Paulus II mengajak semua orang di dunia untuk bekerja sama mengentaskan kemiskinan, bukan hanya mengeluh dan pasrah terhadap situasi dan kondisi kemiskinan.

Kerja sama yang baik di bidang migrasi merupakan salah satu cara atau perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dunia. Sebab, kerja sama yang baik di bidang migrasi dapat mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, marjinalisasi, dan represi, sehingga para migran dapat bekerja dengan baik dan benar. Hemat kami, bekerja dengan baik dan benar dapat membantu para migran untuk menghasilkan uang dengan baik dan benar, sehingga uang yang terkumpul itu dapat membantu mereka untuk menjadi lebih sejahtera dan keluar dari cengkeraman kemiskinan. Apalagi pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan individu pekerja migran sendiri (Vika Septi Rahmawati, dkk., 2024:1). Misalnya, dari 1979 hingga 2018, China mengalami migrasi penduduk yang pesat dan berskala besar dari desa ke kota. Akibatnya, populasi perkotaan permanen meningkat sekitar 659 juta, dan jumlah masyarakat miskin pedesaan berkurang 754 juta.

Utang Luar Negeri

Ada banyak negara yang memiliki utang luar negeri. Tentu, utang luar negeri itu dipakai untuk berbagai keperluan dari negara yang mengutang. Misalnya, Indonesia mengutang untuk membangun infrastruktur publik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena utang, dana yang dipinjam itu tentunya harus dikembalikan. Menurut Paus Yohanes Paulus II, sebagaimana tertulis dalam ensiklik *Centesimus Annus*, utang mesti dilunasi, tetapi cara-cara mesti ditemukan agar tidak membahayakan "hak asasi bangsa-bangsa atas kelestarian dan kemajuannya" (Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, 2009:307).

Salah satu cara untuk melunasi utang luar negeri ialah dengan mendukung migrasi. Sebab dari migrasi, orang bisa kerja di luar negeri. Dari kerja itu, para migran dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian negara, yaitu lewat devisa negara. Dengan devisa negara dan penghasilan yang lain, utang luar negeri bisa dibayar secara perlahan. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain lewat penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara (Vika Septi Rahmawati, dkk., 2024:1).

Solusi Birokrasi

Terdapat beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kinerja program pengiriman di masa depan. Agar target dan tujuan program bisa lebih efektif, diperlukan perbaikan baik dari dalam maupun luar program (Bambang Picakcono Triantoro, :14-15). *Pertama*, dari sisi internal, perlu ada pengurangan birokrasi dalam program yang mencakup peningkatan efisiensi proses pengurusan dokumen kerja. Ini akan memangkas rantai birokrasi yang panjang, sehingga calon migran pekerja bisa lebih mudah mengakses layanan. Selain itu, mendirikan Kantor Layanan Bersama dalam satu sistem pelayanan yang terkoordinasi atau terpadu juga merupakan langkah yang sangat mendesak untuk segera diambil. Dalam sistem pelayanan terpadu ini, calon pengguna hanya perlu datang ke satu lokasi yang menawarkan berbagai kemudahan, terutama dalam hal informasi yang dibutuhkan dan prosedur administratif untuk migran pekerja. Sistem ini akan melibatkan Balai Depnaker, Kantor Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan PJTKI, agar calon pekerja dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait program dan mengurus semua dokumen administratif yang dibutuhkan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pembentukan sistem layanan terpadu ini juga berfungsi untuk mengurangi praktik percaloan tenaga kerja di desa yang merugikan para calon pekerja, terutama terkait penipuan dan eksploitasi biaya administrasi.

Kedua, perbaikan dari sisi eksternal dilakukan dengan melibatkan lembaga informal di daerah asal migran untuk memperkenalkan program tersebut. Kenyataannya, calon migran pekerja yang memiliki tingkat pendidikan, informasi, dan interaksi dengan birokrasi yang rendah merasa kesulitan dalam mengakses layanan program. Dengan melibatkan lembaga informal setempat, diharapkan bisa tercipta jembatan antara program dan calon migran pekerja. Sebagai elemen penting dalam masyarakat di daerah asal migran, lembaga informal bisa digunakan untuk mempengaruhi calon migran agar memilih jalur resmi saat bermigrasi ke Malaysia, serta mengurangi penggunaan jalur ilegal oleh calon migran tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa migrasi pada umumnya baik dan berguna bagi masyarakat internasional. Intinya, proses dan pelaksanaan migrasi dibuat dan diatur dengan baik dan benar. Oleh karena itu, semua elemen dari masyarakat internasional mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengatur proses dan pelaksanaan migrasi secara baik dan benar.

Tentu, Gereja pertama-tama sudah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya lewat ASG tentang masyarakat internasional. Di samping itu, ada banyak hal praktis yang sudah dibuat dan diatur oleh Gereja dalam mendukung dan mengusahakan migrasi yang baik dan benar di dunia ini. Harapannya, segala sesuatu yang sudah dimulai oleh Gereja

didukung, diteruskan, dan dilanjutkan oleh semua elemen dari masyarakat internasional, tanpa pandang agama, negara, komunitas, kelompok, atau golongan tertentu. Sebab, semua warga dunia itu satu dan sama, yakni manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur dan mulia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Gulo, Arif Yupiter. "Berilah Aku Minum: Mengungkap Makna Dialogis Yesus dengan Perempuan Samaria Berdasarkan Yohanes 4:7b". *Integritas: Jurnal Teologi*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Rahmawati, Vika Septi, dkk. "Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara". *Ekonomika Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada*, Vol. 6, Juni 2024.
- Taufik dan Sundari Ayu Pratiwi. "American First: Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat". *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 6, No. 1, November 2021.
- Triantoro, Bambang Picakcono. "Migrasi Legal dan Ilegal ke Malaysia Barat: Kasus Migrasi Internasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat". *Populasi*, Vol. 10, No. 2, 1999.
- Yustitianiingtyas, Levina. "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)". *Perspektif*, Vol. 20, No. 2, Mei 2015.

Buku Teks

- Kadima, Patrick Lukusa. *Public International Law*. 2024.
- Mafruhah, Izza dkk. *Migrasi dan Permasalahan: Sebuah Over View Kondisi di Indonesia*. Surakarta: Amarta Press, 2017.
- Mau, Ellon Belwan C. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital 2024.
- Paus Fransiskus. *Evangelii Gaudium (Sukacita Injil)*. Terj. F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2014.
- Riyanto, Armada. *Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Snyder, Susanna, Joshua Ralston, dan Agnes M. Brazal. *Church in an Age of Global Migration*. New York: Palgrave Mac Millan, 2016.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia). *Membuat Narasi Migrasi: Panduan Praktis Meliput Migrasi Berstandar Etika untuk Profesional Media*. Jakarta: IOM Indonesia, 2021.
- Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.